

## DAFTAR BACAAN

### Buku - Buku

Abdusalam, "Hukum Ketenagakerjaan", Cet. III, Restu Agung, Jakarta, 2017.

Alamsyah, Dedi., R. Muliawati, "Pilar Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat", Cet. I, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013.

Amrusi, Fahmi, "Hukum Pemerintah Daerah", Nusamedia, Cet.I, Bandung, 2012.

Asshiddiqie Jimly, M. Ali Safa'at, "Teori Hans Kelsen Tentang Hukum", Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.

Busrizalti M, "Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya", Cet. I, Total Media, Yogyakarta, 2013.

Ishaq, "Dasar-Dasar Ilmu Hukum", Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

Khakim, Abdul, "Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia", Cet. XXXII, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Marzuki Peter Mahmud, "Pengantar Ilmu Hukum", Cet. VI, Kencana, Jakarta, 2014.

Rahardjo Satjipto, "Ilmu hukum", Cet. VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Rauta Umbu, "Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah", Penerbit: Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.

Salle, Sistem Hukum dan Penegakan Hukum", Cet. I, CV. Sosial Politic Genius, Makassar, 2020.

Sidablok Janus, "Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia", Cet. III, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Sintara, Dani, “Hukum Pemerintahan Daerah”, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2017.

Syaukani Imam, A. Ahsin Thohari, “Dasar-dasar politik Hukum”, Cet. XI, Depok, Rajawali Pers, 2018

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan social

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 Tentang Pedoman SatuanPolisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS)

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Pengangkatan Tenaga Kontrak Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentanfg satuan polisi pamong praja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesla Nomor 43 Tahun 2007 tentang

perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan tenaga kontrak menjadi calon tenaga negeri sipil

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.Sm.02.02/2022 Tentang Status Ketenagaan Di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

### **Jurnal Hukum**

Khusnul Ikhsana, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja kontrak Berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Volume. 2, No. 1, Jambi, 2022.

Putra Made Aditya Pramana Putra, “Perlindungan Hukum Tenaga Kontrak Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, Volume 5, No 3, Bali, 2016.

Saputra Yudi Permana, “Perlindungan Hukum Terhadap Satpol PP kontrak Dalam Bertugas Di Daerah”, Volume.8, No.2, Mataram, 2020.

Sigar Desiana Ullly “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga kontrak Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Volume. IX, No.1, Sulawesi, 2021.

Sriastuti Baiq, “Kedudukan Tenaga Honorer berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014”, Volume. V, No.2, Mataram, 2017

## **Skripsi**

Aldino M Sigit, “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga kontrak Pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lombok Timur”, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Mataram, 2022.

Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, Programm Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003

Pramono, Angga Setyo, “Pelaksanaan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang”, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Social, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2019.

Rivald, Rahmad Arif, “Kedudukan Tenaga kontrak Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Sarolangun Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2021.

Sukmayanti, Amina, “Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Halmahera Timur”, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2021.

Suraya Hanifah, “Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Status Tenaga kontrak Setelah Berlakuknya Undang Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara”, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, 2019.

Wattimena Meggi C.F, “Implementasi Kebijakan Pengangkatan Tenaga kontrak Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Kantor BKD Provisinsi Maluku Utara.” Vol. 2, No. 4, Sulawesi, 2014.

### **Media Daring**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Legislator Komisi Ii Akan Perjuangkan Nasib Kontrak Satpol PP” diunggah tanggal 25 Desember 2022,

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40008/t/legislator+komisi+ii+akan+perjuangkan+nasib+kontrak+satpol+pp>.

Karunia, Ade Miranti, ‘BKN: 1,7 Juta Peserta Ikut Tes SKD CPNS 2021’, Kompas (online), di unggah 10 Oktober 2021, <https://money.kompas.com/read/2021/10/13/214400426/bkn--1-7-juta-peserta-ikut-tes-skd-cpns-2021?page=all>.

Satuan polisi pamong praja kabupaten Kampar, “Sejarah satuan polisi pamong praja”, Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi satuan polisi pamong praja kabupaten Kampar, di unggah 4 Agustus 2019, <https://satpolPP.kamparkab.go.id/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja/>.